

**PENGAKUAN DAN PENGUATAN PEMERINTAHAN ADAT
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA:
STUDI KASUS KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN
RAJA NEGERI WARAKA**

TESIS

Oleh:

**PIERE A.L LAILOSSA
2402190009**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**PENGAKUAN DAN PENGUATAN PEMERINTAHAN ADAT
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA:
STUDI KASUS KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN
RAJA NEGERI WARAKA**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

**Oleh:
Piere A.L Lailossa
2402190009**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Piere A.L Lailossa
Nim : 2402190009
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “Pengakuan dan Penguatan Pemerintahan Adat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Kasus Kedudukan dan Kewenangan Raja Negeri Waraka”.

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saja.
2. Hukum merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, Mei 2026



Piere A.L Lailossa
NIM: 2402190009



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**PENGAKUAN DAN PENGUATAN PEMERINTAHAN ADAT DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA: STUDI KASUS
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN RAJA NEGERI WARAKA**

Oleh :

Nama : Piere A.L Lailossa
Nim : 2402190009
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, Mei 2026

Menyetujui,

Pembimbing I

Prof. Dr. Aarce Tehupeiory, S.H., M.H.
NIP/NUPTK: 981456/5146743644230093

Pembimbing II

Pdt. Dr. Marudut Parulian Silitonga, S.Th., S.H., M.H.
NIP/NUPTK: 201720/6660744645130072

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister

Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NIP/NUPTK: 191691/1237749650130143

Pjs. Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.
NIP/NUPTK: 171443/0557759660138022



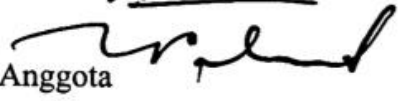
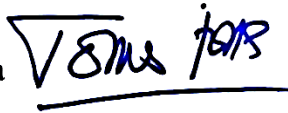
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 8 Juni 2026 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi Sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Piere A.L Lailossa
Nim : 2402190009
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“PENGAKUAN DAN PENGUATAN PEMERINTAHAN ADAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA: STUDI KASUS KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN RAJA NEGERI WARAKA”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Aarce Tehupeiory, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2. Pdt. Dr. Marudut Parulian Silitonga, S.Th., S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 8 Juni 2026



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Piere A.L Lailossa

Nim : 2402190009

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Tugas Akhir : Tesis

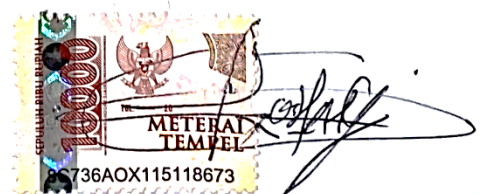
Judul : Pengakuan dan Penguatan Pemerintahan Adat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Kasus Kedudukan dan Kewenangan Raja Negeri Waraka

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun.
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database, merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, Juni 2026



Piere A.L Lailossa
NIM: 2402190009

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala mukjizat, rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul **“Pengakuan dan Penguatan Pemerintahan Adat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Kasus Kedudukan dan Kewenangan Raja Negeri Waraka”** ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum tata negara dan hukum adat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengakuan dan penguatan pemerintahan adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan Raja Negeri Waraka sebagai representasi pemerintahan adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat hukum adat di Maluku. Di tengah dinamika hubungan antara hukum negara dan hukum adat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif akademik mengenai harmonisasi keduanya dalam sistem hukum nasional.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa keberhasilannya tidak lepas dari bantuan, arahan, dukungan, dan dari berbagai pihak terutama kepada dosen pembimbing yang benar-benar totalitas untuk terselesainya Tesis ini, penghormatan yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Prof. Dr. Aarce Tehupeiori, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Pdt. Dr. Marudut Parulian Silitonga, S.Th., S.H., M.H. selaku Pembimbing II, serta Bapak Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H. selaku dosen Penguji dan Pjs Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Tak lupa juga, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis dalam bimbingan dan juga memberikan masukan yang sangat berharga demi terselesainya tesis ini.

Demikian juga penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para guru besar, dosen dan staf Akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yaitu:

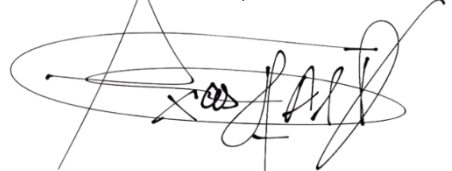
1. Dr. David M.L. Tobing., S.H., M.Kn, selaku Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia (UKI).
2. Prof. Angel Damayanti, S.IP., M.Si., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Pjs Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., M.H., yang turut membantu mengarahkan penulis dalam melakukan penelitian ini.

5. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Program Pascasarjana UKI, atas ilmu, dukungan, dan pelayanan yang diberikan selama masa perkuliahan.
6. Orang tua tersayang, Bapak Christofol Lailossa, S.Sos., M.A.P dan Ibu Paulin Kanipa atas doanya yang tulus dan kasih sayang yang tak terhingga dalam hidup penulis, termasuk dukungan, motivasi, ajaran, bimbingan dan kepercayaannya kepada penulis selama menempuh pendidikan Magister Hukum ini.
7. Adik-adik tercinta Reinnel C.H Lailossa, Thania Nusaina Lailossa dan Rapie Herepulane Lailossa atas doa, motivasi, semangat, dorongan dan bantuannya kepada penulis selama menempuh pendidikan Magister Hukum ini.
8. Sarah Lestari Bouzaidi, S.H. cinta dan penyemangat penulis yang selalu hadir menemani setiap proses penulis, yang dengan ketulusan, kesabaran, doa, perhatian, dan dukungannya telah menjadi tempat penulis bertukar pikiran, menguatkan langkah, serta menjaga semangat penulis selama menempuh pendidikan Magister Hukum ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan penelitian ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum tata negara dan hukum adat, serta menjadi bahan kajian bagi akademisi, praktisi hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam memahami pentingnya pengakuan dan penguatan pemerintahan adat dalam sistem hukum nasional.

Jakarta, Mei 2026



Piere A.L. Lailossa

NIM: 2402190009

DAFTAR ISI

	HALAMAN
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
1.4. Kerangka Teori dan Konsep.....	9
1.4.1 Kerangka Teori	9
1.4.2 Kerangka konsep.....	15
1.5. Metode penelitian	17
1.5.1 Spesifikasi Penelitian	17
1.5.2 Pendekatan Penelitian	18
1.5.3. Jenis dan Sumber Data.....	18
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
1.5.5. Teknik Analisis Data	20
1.5.6. Lokasi Penelitian.....	21
1.5.7. Orisinalitas Penelitian.....	22
1.6. Sistematika penulisan	24
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 27
2.1 Teori-Teori yang Relevan dalam Analisis Pemerintahan Adat.....	27
2.1.1. Teori Hukum Adat.....	27
2.1.2. Teori Otoritas.....	40
2.2 Konsep Pemerintahan Adat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ...	43
2.2.1. Konsep Rekognisi Masyarakat Hukum Adat dalam Perspektif Konstitusi Indonesia	44
2.2.2. Kedudukan Negeri dalam Sistem Pemerintahan Indonesia....	54
 BAB III KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN RAJA NEGERI WARAKA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA.....	 59
3.1. Gambaran Umum Negeri Waraka	59
3.1.1. Sejarah Singkat Negeri Waraka.....	59
3.1.2. Struktur Pemerintahan Negeri Waraka	68

3.1.3.	Proses Pengangkatan Raja Negeri Waraka.....	78
3.2.	Kedudukan Raja Negeri Waraka menurut Hukum Nasional dan Hukum Adat di Negeri Waraka.....	84
3.2.1.	Kedudukan Raja Negeri Waraka menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	85
3.2.2.	Kedudukan Raja menurut Hukum Adat di Negeri Waraka	96
3.3.	Kewenangan Raja Negeri Waraka menurut Hukum Nasional dan Hukum Adat di Negeri Waraka.....	101
3.3.1.	Kewenangan Raja Negeri Waraka menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	102
3.3.2.	Kewenangan Raja menurut Hukum Adat di Negeri Waraka.	110
BAB IV STRATEGI PENGUATAN PEMERINTAHAN ADAT NEGERI WARAKA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA		120
4.1.	Analisis Pertentangan Peraturan Perundang-Undangan dengan Hukum Adat di Negeri Waraka terkait Kedudukan dan Kewenangan Raja	121
4.2.	Harmonisasi Regulasi.....	130
4.3.	Optimalisasi Regulasi.....	140
BAB V PENUTUP		149
5.1.	Kesimpulan.....	149
5.2.	Saran	150
DAFTAR PUSTAKA.....		153

ABSTRAK

- Judul Tesis : Pengakuan dan Penguatan Pemerintahan Adat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Kasus Kedudukan dan Kewenangan Raja Negeri Waraka.
- Kata Kunci : Pemerintahan Adat, Raja Negeri Waraka, Masyarakat Hukum Adat, Ketatanegaraan Indonesia, Penguatan Hukum Adat.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara konstitusional dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya, pengakuan tersebut masih sering bersifat deklaratif dan belum sepenuhnya diikuti dengan pengaturan yang jelas mengenai kedudukan serta kewenangan pemerintahan adat. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan disharmoni antara hukum negara dengan hukum adat, khususnya dalam pelaksanaan pemerintahan adat di berbagai daerah. Salah satu contoh nyata terdapat di Negeri Waraka, Kabupaten Maluku Tengah, di mana Raja Negeri Waraka memiliki posisi ganda sebagai pemimpin adat sekaligus bagian dari sistem pemerintahan formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan Raja Negeri Waraka dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta merumuskan strategi penguatan pemerintahan adat Negeri Waraka agar memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum yang lebih efektif dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan dukungan data wawancara. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Data yang digunakan terdiri dari data primer melalui wawancara dengan Raja Negeri Waraka, serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan hukum adat, pemerintahan adat, dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada penafsiran normatif terhadap peraturan perundang-undangan serta analisis teoritik melalui dua teori utama yakni teori hukum adat dan teori otoritas, dilengkapi beberapa teori atau konsep tambahan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan kewenangan Raja Negeri Waraka secara konstitusional dan normatif telah memperoleh pengakuan melalui UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta berbagai regulasi daerah di Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah. Akan tetapi, pengaturan tersebut masih menyisakan ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan antara pemerintahan adat dan pemerintahan formal sehingga berpotensi menimbulkan konflik kewenangan dan marginalisasi hukum adat. Di sisi lain, secara sosiologis, kewenangan Raja Negeri Waraka tetap memperoleh legitimasi kuat dari masyarakat adat karena bersumber dari hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan pemerintahan adat melalui harmonisasi regulasi, penegakan kedudukan hukum pemerintahan adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,

penguatan kelembagaan adat, serta optimalisasi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat agar tercipta hubungan yang harmonis antara hukum negara dan hukum adat dalam kerangka negara hukum Indonesia.

Kata Kunci: Pemerintahan Adat, Raja Negeri Waraka, Masyarakat Hukum Adat, Ketatanegaraan Indonesia, Penguatan Hukum Adat.



ABSTRACT

Thesis Title : Recognition and Strengthening of Customary Government within the Indonesian Constitutional System: A Case Study on the Position and Authority of the King of Negeri Waraka.

Keywords : Customary Government, King of Negeri Waraka, Indigenous Peoples, Indonesian Constitutional System, Strengthening of Customary Law.

The recognition of indigenous peoples within the Indonesian constitutional system is constitutionally guaranteed under Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in practice, such recognition often remains merely declaratory and has not been fully followed by clear regulations concerning the position and authority of customary governments. This condition has created legal uncertainty and disharmony between state law and customary law, particularly in the administration of customary governance in various regions. One significant example can be found in Negeri Waraka, Central Maluku Regency, where the King of Negeri Waraka holds a dual position as both a customary leader and a part of the formal governmental system. This research aims to analyze the position and authority of the King of Negeri Waraka within the Indonesian constitutional system and to formulate strategies for strengthening the customary government of Negeri Waraka in order to achieve more effective legal recognition and protection within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

This study employs a normative juridical research method supported by interview data. The approaches applied include the statutory approach, the conceptual approach, and the historical approach. The data consist of primary data obtained through interviews with the King of Waraka Negeri, as well as secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal materials relating to customary law, customary government, and the Indonesian constitutional system. Data were analyzed qualitatively, emphasizing normative interpretation of statutory regulations and theoretical analysis based on two principal theories, namely the theory of customary law and the theory of authority, supplemented by other relevant theories and concepts.

The findings reveal that the position and authority of the King of Negeri Waraka have constitutionally and normatively been recognized through the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 6 of 2014 concerning Villages, and various regional regulations in Maluku Province and Central Maluku Regency. Nevertheless, these regulations still leave ambiguities regarding the division of authority between customary governance and formal governmental institutions, thereby creating the potential for conflicts of authority and marginalization of customary law. Sociologically, however, the authority of the King of Negeri Waraka continues to obtain strong legitimacy from the indigenous community because it is rooted in customary law that lives and develops within

society. Therefore, strategies to strengthen customary governance are necessary through regulatory harmonization, clarification of the legal status of customary governments within the Indonesian constitutional system, strengthening customary institutions, and optimizing the protection of indigenous peoples' rights in order to establish a harmonious relationship between state law and customary law within the framework of the Indonesian rule of law.

Keywords: Customary Government, King of Negeri Waraka, Indigenous Peoples, Indonesian Constitutional System, Strengthening of Customary Law.

